

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Tahun 2009 membentuk status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana yang mengukur tingkat potensi rawan bencana. Indeks Risiko Bencana diukur melalui tiga komponen, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020, Sumatera Barat memiliki kelas risiko bencana yang tinggi. Ancaman bencana yang terdapat di Sumatera Barat yaitu gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi. Indeks Risiko Bencana di Sumatera Barat berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kelas Risiko 2020
1	Agam	209. 20	209. 20	209. 20	209. 20	209. 20	209. 20	Tinggi
2	Pasaman Barat	203. 20	203. 20	203. 20	203. 20	203. 20	203. 20	Tinggi
3	Kepulauan Mentawai	197. 20	197. 20	197. 20	197. 20	197. 20	197. 20	Tinggi

¹ UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

4	Pesisir Selatan	189. 60	189. 60	189. 60	189. 60	189. 60	189. 60	Tinggi
5	Pasaman	178. 00	178. 00	178. 00	178. 00	178. 00	178. 00	Tinggi
6	Pariaman	171. 20	171. 20	171. 20	171. 20	171. 20	171. 20	Tinggi
7	Padang	209. 20	209. 20	191. 60	191. 60	169. 92	169. 92	Tinggi
8	Padang Pariaman	196. 80	196. 80	184. 11	184. 11	180. 72	167. 21	Tinggi
9	Dharmasraya	143. 20	143. 20	143. 20	143. 20	143. 20	143. 20	Sedang
10	Solok	137. 20	137. 20	137. 20	137. 20	137. 20	137. 20	Sedang
11	Solok Selatan	137. 20	137. 20	137. 20	137. 20	137. 20	137. 20	Sedang
12	Bukittinggi	130. 00	130. 00	130. 00	130. 00	130. 00	130. 00	Sedang
13	Tanah Datar	125. 20	125. 20	125. 20	125. 20	125. 20	125. 20	Sedang
14	Kota Solok	125. 20	125. 20	125. 20	125. 20	125. 20	125. 20	Sedang
15	Lima Puluh Kota	119. 20	119. 20	119. 20	119. 20	119. 20	119. 20	Sedang
16	Padang Panjang	113. 20	113. 20	113. 20	113. 20	113. 20	113. 20	Sedang
17	Sawahlunto	113. 20	113. 20	113. 20	113. 20	113. 20	113. 20	Sedang
18	Sijunjung	107. 20	107. 20	107. 20	107. 20	107. 20	107. 20	Sedang
19	Payakumbuh	104. 80	104. 80	104. 80	104. 80	104. 80	104. 80	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki potensi bencana. Kabupaten/kota di Sumatera Barat berada pada kelas risiko sedang dan tinggi. Pada tabel dapat dilihat bahwa hanya Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman yang mengalami penurunan risiko bencana sepanjang Tahun 2017 hingga 2020. Namun, potensi bencana Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman masih berada pada kategori tinggi.

Berdasarkan data geologi, para ahli memperkirakan bahwa di Sumatera Barat akan terjadi gempa bumi besar (megathrust) dengan magnitudo 8,9 skala richter.² Penduduk yang terancam tsunami akibat Mentawai Megathrust adalah penduduk yang berada di sepanjang pesisir barat Provinsi Sumatera Barat. Adapun penduduk yang terancam oleh gempa Megathrust Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut³:

Tabel 1.2
Penduduk Terancam oleh Megathrust Mentawai di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jiwa Terancam
1	Kabupaten Pesisir Selatan	245.916
2	Kota Padang	508.804
3	Kabupaten Padang Pariaman	24.861
4	Kota Pariaman	25.029
5	Kabupaten Agam	20.644
6	Kabupaten Pasaman Barat	78.782
7	Kabupaten Kepulauan Mentawai	17.319

Sumber: Rencana Kontigensi Sumatera Barat Tahun 2011

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui penduduk terancam terbanyak akibat mentawai megathrust terdapat di Kota Padang dengan 508.804 jiwa. Dengan demikian dapat

² Arwin D.W Sumari. Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi-Tsunami di Pangkalan TNI AU Padang Akibat Megathrust Mentawai, Jurnal Pertahanan, 2016, Vol 6 No 1, hlm. 119.

³ Rencana Kontigensi Tsunami Sumatera Barat diakses pada <https://bnpb.go.id/uploads/24/rencana-kontigensi-tsunami-sumatera-barat.pdf>

diketahui bahwa Kota Padang memiliki potensi bencana serta penduduk terancam terbanyak akibat bencana. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Padang untuk mengurangi risiko akibat bencana.

Kota Padang yang rawan terhadap tsunami dan gempa juga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap longsor dan banjir. Kota Padang menjadi satu satunya daerah di Sumatera Barat yang seluruh wilayah kecamatannya memiliki potensi terhadap longsor dan banjir.⁴ Salah satu kejadian banjir di Kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Banjir di Koto Tengah Kota Padang Tahun 2021



Sumber: BPBD Kota Padang 2021

Kota Padang yang memiliki potensi bencana tinggi, memiliki keseriusan dalam pengurangan risiko bencana, hal ini dibuktikan dengan diraihnya Anugerah Tangguh Adhiwirasana dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Tahun 2021. Penghargaan tersebut diberikan kepada kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja unggul dalam melakukan penanggulangan bencana di daerahnya.⁵ Dengan diraihnya Anugerah Tangguh Adhiwirasana oleh Kota Padang menandakan adanya keinginan serta keseriusan pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana.

⁴ Wilayah Daerah Rawan Bencana Tsunami, Gempa, dan Cuaca Ekstrem (Longsor dan Banjir) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

⁵ <https://www.harianhaluan.com/news.com/news/pr-10547150/satu-satunya-di-sumbar-kota-padang-berhasil-raih-anugerah-tangguh-adhiwirasana>

Upaya yang dilakukan Kota Padang dalam pengurangan risiko bencana yaitu dengan melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana. Program Kelurahan Tangguh Bencana merupakan program pusat yang dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Program Kelurahan Tangguh Bencana berlandaskan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Program Kelurahan Tangguh Bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di tingkat desa/kelurahan agar memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.⁶ Adapun tujuan dari Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu⁷:

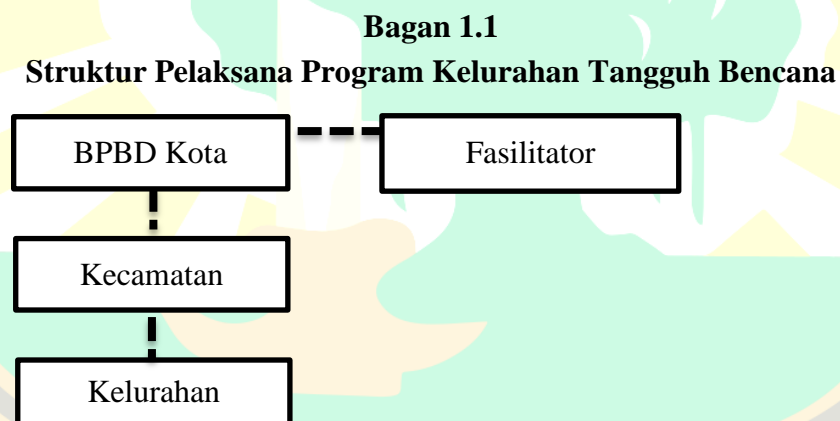
1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak merugikan bencana
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana
4. Meningkatkan pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana

⁶ Perka BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

⁷ Perka BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok lainnya yang peduli

Program Kelurahan Tangguh Bencana merupakan jawaban atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana ditingkat daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana. Adapun struktur pelaksana Program Kelurahan Tangguh Bencana dapat dilihat pada bagan berikut:



*Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Pedoman Umum
Kelurahan Tangguh Bencana*

Berdasarkan Bagan 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat proses manajemen dalam pengorganisasian berupa pembagian tugas terhadap pelaksana program serta koordinasi antar pelaksana program. BPBD kabupaten/kota berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan program dengan menyediakan sumber daya dan bantuan anggaran yang dibutuhkan desa/kelurahan.⁸ Kecamatan berperan membantu BPBD

⁸ Perka BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

kabupaten/kota dalam memantau dan memberikan bantuan anggaran bagi pelaksana di tingkat kelurahan.

BPBD kabupaten/kota memfasilitasi desa/kelurahan dengan menyediakan fasilitator untuk pengembangan kelurahan tangguh bencana. Dengan demikian terdapatnya pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana kepada fasilitator. Fasilitator kelurahan tangguh bencana bertugas untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan untuk mencapai komponen kelurahan tangguh bencana.

Program Kelurahan Tangguh Bencana secara nasional mulai dilaksanakan pada Tahun 2013. Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana pada Tahun 2014, dan Kota Padang menjadi salah satu *pilot project* pelaksanaan program di Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang melaksanakan program pada Tahun 2015 di Kelurahan Bungus Selatan dan Lolong Belanti. Hal ini dapat diketahui pada hasil wawancara dengan Henry sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang:

“Saat ini sudah tiga kelurahan yang melaksanakan program ini di Padang yaitu Kelurahan Bungus Selatan dan Lolong Belanti Tahun 2015, kemudian Kelurahan Olo pada Tahun 2021. Untuk ketentuan kelurahan yang akan melaksanakan program ini dipilih karena memiliki potensi bencana yang tinggi, diutamakan kelurahan yang berada di zona merah tsunami. Dari 104 kelurahan di Padang, ada 35 kelurahan yang berada di zona merah tsunami. Pada Tahun 2016 hingga 2020 tidak dilaksanakan program karena tidak ada dianggarkan oleh pemerintah kota. Kegiatan yang lain banyak yang lebih penting, karena pemerintah itu punya skala prioritas, misalnya bencana non alam covid ini, jadi anggaran banyak yang diarahkan kesana”⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui Program Kelurahan Tangguh Bencana tidak terlaksana selama lima tahun. Kota Padang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Barat menandakan Kota Padang memiliki sumber daya yang memadai untuk dapat diberdayakan menjadi forum pengurangan risiko bencana. Namun, sejak Tahun 2015 hingga

⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Drs. Hendy, MM sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang pada 9 November 2021 pukul 09.00 WIB

2021 hanya tiga dari 104 kelurahan yang telah melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang yaitu Kelurahan Bungus Selatan, Kelurahan Lolong Belanti, dan Kelurahan Olo. Dengan demikian proses perencanaan program untuk menetapkan tujuan berupa meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana masih rendah.

BPBD Kota Padang menetapkan zona merah tsunami berdasarkan enam sektor kelurahan. Kelurahan yang termasuk zona merah tsunami adalah Padang Pasir, Olo, Belakang Tangsi, Berok Nipah, Kampung Jao, Kampung Pondok, Alang Laweh, Ranah Parak Rambio, Pasa Gadang, Batang Arau, Seberang Palinggam, dan Seberang Padang. Berdasarkan hasil kajian Fitra Riyan dan Abiyyu Rizqullah menyimpulkan jalur evakuasi zona merah menuju zona aman tidak efektif.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut diperlukan pengetahuan dari masyarakat agar dapat mengurangi risiko terdampak bencana melalui Program Kelurahan Tangguh Bencana. Namun, dari enam kelurahan zona merah tsunami, hanya satu kelurahan yang telah melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu Kelurahan Olo.

Kelurahan yang menjadi sasaran program diusulkan oleh BPBD Kota Padang dengan mempertimbangkan wilayah yang rawan bencana. Kemudian kelurahan yang terpilih akan diberikan SK oleh BPBD Kota. Kelurahan yang terpilih akan membentuk kelompok yang terdiri dari 20 orang perwakilan masyarakat. Kemudian kelompok akan melaksanakan kegiatan berupa pelatihan dan sosialisasi yang diberikan oleh BPBD Kota.

Pengukuran pelaksanaan program perlu dilakukan dengan menentukan sebab terjadinya kegagalan dan mengambil tindakan korektif sehingga dalam pelaksanaan program selanjutnya dapat lebih baik. Setelah kelurahan melaksanakan kegiatan, terdapat penilaian yang dibedakan menjadi tiga kriteria. Kriteria ditetapkan berdasarkan skor penilaian kebijakan PRB yang

¹⁰ Fitra Rifwan dan Abiyyu Rizqullah, Analisis Efektifitas Jalur Evakuasi Daerah Sektor Enam Peta Evakuasi Kota Padang, *Journal of Civil Engineering and Vocational Education*, 2021, Vol 8 No 3, hlm 132.

dilegalkan dalam bentuk peraturan desa atau perangkat hukum setingkat kelurahan, dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana, forum PRB, tim relawan kelurahan, upaya pengkajian risiko, dan upaya peningkatan kapasitas yang terdapat di kelurahan. Urutan tingkatan kriteria kelurahan tangguh bencana dari nilai tertinggi yaitu utama, madya, dan pratama. Berkaitan dengan hal ini, Drs. Henry, MM selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang mengatakan bahwa:

“Program ini dilaksanakan pertahun dengan melakukan beberapa pertemuan kepada Kelompok Siaga Bencana. Tahun 2021 ini ada 15 pertemuan, kalau Tahun 2015 dulu ada 20 pertemuan. Perkembangan tentu ada, saat ini kelurahan yang sudah melaksanakan program berada pada kriteria pratama.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kelurahan yang telah melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang berada pada kriteria pratama. Hal ini menandakan masih belum terwujudnya secara optimal Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang karena belum mendapatkan skor penilaian utama. Melihat sedikitnya kelurahan yang melaksanakan program, hendaknya pemerintah dapat lebih optimal melaksanakan program.

Berbeda dengan pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana pada 13 nagari dari 14 nagari yang berada di zona merah.¹² Upaya pengurangan risiko bencana oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman membentuk inovasi berupa Peta GIS Rawan Bencana berbasis

¹¹ Hasil wawancara peneliti dengan Drs. Henry, MM sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang pada 29 November 2021 pukul 09.00 WIB

¹² Padangpariaman.go.id

NIK.¹³ Dengan demikian terdapatnya keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengurangan risiko bencana melalui Program Kelurahan Tangguh Bencana.

Daerah lain yang memiliki keseriusan dalam pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu Kota Sawahlunto. Sawahlunto mulai melaksanakan program sejak Tahun 2016 di Desa Silungkang Oso dan Desa Lumindai. Fachrul Rozi sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa:

“Destana yang berkembang itu Sawahlunto. Untuk menunjang tercapainya Destana itu ada keterlibatan dana desa, sudah bisa dan mau menggunakan dana desa, sudah mandiri ketika ada bencana, hubungan stakeholdernya yaitu kepala desa, masyarakat, KSB, dan BPBD baik. Kalau Sawahlunto dapat dikatakan sudah begitu. Mereka ketika terjadi bencana, kerusakannya juga sudah rendah.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui Kota Sawahlunto memiliki kapasitas bencana yang baik. Hal ini menandakan telah tercapainya salah satu tujuan Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat. Hal ini hendaknya dapat menjadi percontohan bagi daerah lain terutama Kota Padang yang memiliki risiko bencana yang tinggi di Sumatera Barat.

Pelaksanaan suatu program hendaknya didukung oleh anggaran agar tujuan pelaksanaan program dapat tercapai. Berdasarkan Pedoman Umum Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, sumber anggaran berasal dari APBD Kota. Adapun anggaran yang disediakan untuk melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Anggaran Pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana

No	Kelurahan	Tahun	Anggaran
1	Kelurahan Bungus Selatan	2015	100.000.000
2	Kelurahan Lolong Belanti	2015	100.000.000

¹³ BNPB.go.id/

¹⁴ Hasil wawancara dengan Fachrul Rozi sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat pada 10 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

3	Kelurahan Olo	2021	200.000.000
---	---------------	------	-------------

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan BPBD Kota Padang

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui anggaran program pada Tahun 2021 berjumlah 200.000.000, sedangkan Tahun 2015 berjumlah 100.000.000. Dengan demikian terjadi peningkatan anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana. Meskipun terjadi peningkatan anggaran, pelaksanaan program masih memiliki keterbatasan anggaran sehingga hal ini berdampak pada kurangnya pemeliharaan fasilitas tanggap darurat.¹⁵

Motivasi dalam pelaksanaan program menjadi salah satu yang mendorong potensi sumber daya manusia. Salah satu daerah yang memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan program yaitu Kelurahan Lolong Belanti. Hal ini dilihat dari terdapatnya kegiatan Kelurahan tangguh bencana yang sumber pendanaan kegiatan tersebut menggunakan dana pribadi untuk melakukan pelatihan.¹⁶ Dengan demikian masyarakat menyadari bahwa Program Kelurahan Tangguh Bencana perlu untuk dilaksanakan.

Program Kelurahan Tangguh Bencana sudah banyak diteliti dengan berbagai fokus dan lokus penelitian sehingga menciptakan kebaruan dalam penelitian. Beberapa kajian terdahulu lebih memfokuskan partisipasi masyarakat terhadap Program Kelurahan Tangguh Bencana, seperti yang dilakukan oleh Rimala Salwa 2019¹⁷, Ainun Najib 2021¹⁸ dan Setya Haksanamana

¹⁵ Rimala Salwa, Evaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2019, Vol 2 No 1, hlm. 51

¹⁶ Ibid., hlm. 51

¹⁷ Rimala Salwa, Evaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2019, Vol 2 No 1

¹⁸ Ainun najib, Analisis Pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Buluh Cina, Siak Hulu, Kampar Riau, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, 2021, Vol 5 No 1

2018¹⁹. Rimala Salwa (2019) menyatakan pengurangan risiko bencana harus melibatkan suatu kelompok yang ada dalam masyarakat karena masyarakat itu sendiri yang paling mengenal daerah serta bencana yang ada didaerahnya. Selanjutnya Setya Haksamana 2018 menyatakan jika masyarakat mengenali tanda-tanda tersebut dengan baik akan meminimalisir korban jiwa dan harta. Beberapa kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dari faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat.

Kemudian kajian Program Kelurahan Tangguh Bencana juga dilakukan oleh Friska pada Tahun 2021²⁰. Friska menemukan Program Kelurahan Tangguh Bencana membantu upaya pengurangan risiko tanah longsor yang ada di Sawahlunto. Kajian Munita Reni Tahun 2015 juga menemukan bahwa masyarakat di Kelurahan Srimulyo DIY banyak yang berminat untuk melaksanakan pelatihan longsor melalui Program Destana, hal ini dilihat dari berlebihnya jumlah masyarakat yang mengikuti program dari ketentuan kuota yang ditetapkan BPBD.

Perbedaan kajian-kajian Program Kelurahan Tangguh Bencana yang telah dilakukan sebelumnya dengan kajian yang peneliti lakukan terdapat pada lokus penelitian. Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian perbedaan kajian yang peneliti lakukan dengan kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu peneliti lebih memfokuskan pada proses manajemen berupa bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam mencapai tujuan Program Kelurahan Tangguh Bencana yang dilihat dari proses perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengendalian. Penelitian yang pernah dilakukan

¹⁹ Setya Haksanamana, *Capacity Building* Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Daerah Wisata Kabupaten Banyuwangi dalam Rangka Mendukung Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana), Jurbak Layanan Masyarakat Universitas Airlangga, 2018, Vol 2 No 2

²⁰ Friska, Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Melalui Implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto, *Jurnal of Indonesian Public Administration and Government Studies*, 2021, Vol 5 No 2

sebelumnya lebih memfokuskan pada kapasitas kebencanaan oleh kelompok sasaran yaitu kelurahan dan beberapa penelitian terdahulu melihat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Penelitian ini menjadi menarik karena Kota Padang memiliki persentase penduduk terancam tertinggi di Sumatera Barat sehingga diperlukan upaya pengurangan risiko akibat bencana. Kemudian dari jumlah penduduk Kota Padang yang banyak menandakan Kota Padang memiliki sumber daya yang memadai sehingga hendaknya dapat diberdayakan menjadi forum pengurangan risiko bencana dalam upaya pengurangan risiko akibat bencana. Namun dalam upaya penanggulangan pra bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang belum sebanding dengan tingginya risiko bencana di Kota Padang karena baru dilaksanakan Program Tangguh Bencana oleh tiga kelurahan dari 35 kelurahan zona merah serta penilaian kriteria tangguh bencana masih berada pada kategori pratama. Padahal pemerintah Kota Padang memiliki prestasi kinerja pengurangan risiko serta masyarakat memiliki motivasi dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah peneliti paparkan maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana Manajemen Program Kelurahan Tangguh Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan berjudul **“Manajemen Program Kelurahan Tangguh Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang”**.